

**PERUBAHAN PARADIGMATIK SCIENTIFIC FORESTRY KE
COMMUNITY-BASED FOREST MANAGEMENT: SEBUAH
PENDEKATAN CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS PADA BUKU
PENGAJARAN ”PENGANTAR ILMU KEHUTANAN”
(Scientific forestry to community-based forest management paradigm
Shift : Critical discourse analysis on ”Pengantar Ilmu Kehutanan”
Text Book)**

Oleh / by :
Handoyo¹⁾

ABSTRACT

As indicated in Bourdieu's thesis that science is a social field of forces, struggles, and relationships that is defined at every moment by the relations of power among the protagonists. Scientific choices are guided by taken-for-granted assumptions, interactive with practices, as to what constitutes real and important problems, valid methods, and authentic knowledge. Such choices also are shaped by the social capital controlled by various positions and stances within the field. This complex and dynamic representation thus simultaneously rejects both the absolutist-idealist conception of the immanent development of science and the historicist relativism of those who consider science as purely a conventional social construct. With critical discourse analysis, this paper aim to reveal Bourdieu's dialectic between state forest management practice and science production at Faculty of Forestry, Bogor Institute of Agriculture.

Keywords : critical discourse analysis, Boudieu's dialectic, science production

ABSTRAK

Seperti yang telah diindikasikan oleh Bourdieu, bahwa ilmu pengetahuan dapat dipandang sebagai lapangan (*field*) kekuasaan, perjuangan dan hubungan yang terus-menerus ditentukan oleh hubungan-hubungan kekuasaan diantara para pelaku utama yang bersinggungan sehingga pilihan keilmiahannya dari ilmu pengetahuan itu sendiri dituntun oleh asumsi-asumsi *take for granted*, interaktif dengan praktik yang membentuk masalah-masalah riil dan penting, metoda-metoda yang valid dan pengetahuan yang otentik. Pilihan keilmiahannya tersebut juga dibentuk oleh modal sosial yang dikendalikan oleh posisi tertentu dan sikap mental di dalam *field*. Representasi pengetahuan yang kompleks dan dinamis ini berimplikasi secara simultan pada penolakan konsepsi *absolutist-idealist* yang memandang pengembangan pengetahuan terjadi secara terus-menerus yang mengekspresikan dunia nyata sebagaimana adanya sebagai sebuah kenyataan. Berdiri sebagai oposisi konsepsi tersebut adalah *historicist relativism* yang menyadari bahwa pengetahuan sebagai hasil dari konstruksi sosial, sebagai

¹⁾ Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan Bogor

sesuatu yang konvensional, yang merefleksikan struktur-struktur obyektif dan kepercayaan pada semesta sosial tertentu. Dengan *analisis wacana kritis*, tulisan ini mempunyai tujuan untuk melihat praktik pengelolaan kehutanan negara dan produksi ilmu pengetahuan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dalam dialektika Bourdieu.

Kata kunci : analisis wacana kritis, dialektika Bourdieu, produksi pengetahuan

I. PENDAHULUAN

Praktik pengelolaan hutan di Indonesia yang dilakukan oleh negara mempunyai perjalanan panjang yang bernuansa *germany scientific forestry*. *Scientific forestry* pada awalnya merupakan kaidah yang diterapkan bersamaan dengan kolonialisme dalam mengelola hutan untuk menghasilkan kayu secara lestari. Telaahan historis yang dituangkan dalam bukunya, *”Rich Forest Poor People”*, Nancy Peluso (1992) merangkai definisi *scientific forestry* sebagai sebuah struktur dan ideologi pengelolaan hutan yang “ilmiah” dimana pengelolaan hutan dilakukan dengan ketaatan sistematis terhadap rencana kerja dalam penebangan dan penanaman kembali hutan (dalam perkebunan hutan) sesuai kaidah-kaidah teknologi pengelolaan tanah hutan (silvikultur) yang dikembangkan melalui eksperimentasi dari waktu ke waktu. Bersamaan dengan kolonisasi, praktik *scientific forestry* di kuatkan dengan undang-undang lainnya yang bersifat hakikat kolonial, misalnya, penguasaan lahan oleh negara. Hal ini sangat mempengaruhi cara berpikir Dinas Kehutanan Kolonial (*Boschwezen*) ketika itu, sedemikian sehingga ideologi ini menjadi sesuatu yang birokratis dan inilah yang menjadi cikal bakal falsafah struktur pengelola kehutanan masa kini (Peluso, 1992). Struktur penguasaan dalam struktur kaidah pengelolaan yang demikian ini saling menguatkan yang kemudian berevolusi menjadi relasi kekuasaan yang sangat partikular dan pada akhirnya memengaruhi praktik-praktik kehutanan itu sendiri. Struktur pengelolaan yang demikian berimplikasi pada keniscayaan domain sosial masyarakat di dalamnya. Ketika struktur relasi kekuasaan tersebut mulai mencair, muncul diskursus alternatif yang dianggap mampu menjawab tantangan kelestarian hutan, kelestarian hasil hutan dan diversifikasi hasil hutan itu sendiri. Pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat (*community-based forest management*) menjadi pilihan utama. Diskursus tersebut sebenarnya telah mulai didengungkan sejak Kongres Kehutanan Dunia VIII di Jakarta tahun 1978, yang mengangkat tema *“Forests for People”*. Adanya inersia budaya mengakibatkan kelambanan pengembangan diskursus baru tersebut untuk menggeser diskursus lama.

Perjalanan *elective affinity* antara negara dan *scientific forestry* berimplikasi dikembangkannya *scientific forestry* sebagai basis ilmu kehutanan ke dalam sistem pendidikan (baca : universitas) khususnya sistem pendidikan kehutanan, sebagai piranti negara dalam memproduksi *high level man power* pengelola hutan yang sesuai dengan ideologi yang tengah dikembangkan. Studi Zaidi et al (1980) mengenai peran universitas dalam pembangunan nasional mengindikasikan peran universitas meliputi 1) memberikan solusi bagi pertumbuhan ekonomi; 2) memberikan kontribusi pada kesadaran dan integrasi nasional dengan memberi pertimbangan pada stabilitas politik; 3) menyuplai ide-ide inovatif; 4) memberikan kontribusi pada kesadaran dan integrasi nasional dengan memberi pertimbangan pada stabilitas politik; 4) memberi kontribusi pada peningkatan mobilitas sosial dengan menguji hal-hal yang berhubungan dengan pemerataan kesempatan pendidikan; 5) memperkenalkan sikap-sikap dan nilai-nilai pembangunan seperti meningkatkan modus berfikir rasional, meningkatkan

kebutuhan akan pencapaian dan dorongan membentuk personal yang inovatif. Selain hal tersebut diatas, universitas juga menyediakan tenaga-tenaga terampil (*high-level man power*) yang menggerakkan roda pembangunan (Wernick, 2006).

Delanty (2001) dalam *Challenging Knowledge: The University in The Knowledge Society*, menelaah posisi penting universitas -sebagai sub system masyarakat di dalam negara, yang lahir dari rahim modernitas dan pergeseran posisinya seiring perkembangan era modernitas. Abad kedua puluh merupakan era dari para *expert* dan *profesional society* menggantikan sisa-sisa dari humanisme *enlightment* dimana universitas memenuhi fungsi yang baru di dalam masyarakat; yaitu untuk menyuplai tenaga kerja terlatih. Para guru dan dosen memenuhi peran yang baru yaitu sebagai pelatih profesional. Tema “Pendidikan untuk semua orang” sudah bukan lagi menjadi perhatian (seperti pada cita-cita Humboldtian; *Bildung* atau cita-cita pastor pada zaman *liberal arts collage*) kecuali *ausbildung- vocational training*. Universitas seolah-olah mensahkan model kebudayaan baru dari integrasi sosial dimana hal tersebut menjadikannya sebagai institusi yang melayani kebutuhan ekonomi masyarakat, prestise dan pertahanan negara sebagaimana juga sebagai produser dari *technological expertise*.

Late modernity dimulai dengan krisisnya *organizad modernity* dari era 1960 hingga sekarang. Pada era ini terlihat dengan jelas pergerakan dari krisis menuju kepada transformasi pergeseran kognitif. Ada disintegrasi yang gradual dari *mode of knowledge* yang lebih tua yang berbasiskan pengetahuan berdisiplin yang terinstitusionalisasi ke dalam kerangka kerja nasional dan dilegitimasi oleh model-model budaya modernisasi, spesialisasi dan rutinisasi. *Pertama*, pengetahuan yang secara historis terhubung ke negara, saat ini berada di bawah pengaruh globalisasi, yang diproduksi oleh institusi-institusi didalam masyarakat. *Kedua*, struktur pengetahuan yang berdisiplin di dalam akademi didasarkan pada anggapan dari dua area subyek yang seluruhnya berbeda, *external nature* dan *human nature* dasar dari “dua kultur”. Saat ini, *nature*, kembali muncul sebagai tema baru di ilmu alam dan ilmu sosial. Sebagai sebuah konstruksi, *nature*, seperti halnya masyarakat, tidak dapat dipahami di dalam terminologi dari kategori-kategori modernitas. Disamping itu, banyak studi yang memperlihatkan adanya transformasi yang lebih luas didalam struktur disiplin pengetahuan di universitas. *Ketiga*, konsepsi baru tentang demokrasi dan kewarganegaraan saat ini muncul menantang visi-visi yang lebih dulu ada. Delanty (2001) juga menegaskan kewarganegaraan yang berbasis pada budaya dan teknologi secara sentral dialamatkan untuk isu-isu yang berhubungan dengan pengetahuan. Sebagai hasilnya, massa edukasi, pembangunan media dan pembangunan yang bersifat teknologis di masa masyarakat post-industrial, pengetahuan lebih tersedia dari pada sebelumnya di saat yang sama hal tersebut telah menjadi kebutuhan yang bersifat fungsional. Tetapi melalui ekspansinya ini, muncul kontestasi di dalam pengetahuan itu sendiri. Disensus di dalam nilai-nilai politik dan budaya telah berpenetrasi ke dalam konstitusi universitas. Dan, *keempat*, di dalam debat pada perbedaan-perbedaan antara *science* terdapat pertanyaan yang kemudian dianggap relevan tentang hubungan antara profesional dan jenis pengetahuan yang lain, seperti “*lay knowledge*”. Dengan luasnya deligitimasi ekspertis ilmu dan budaya kemudian hal ini menjadi hal yang penting di dalam reorientasi pengetahuan, yang mempunyai implikasi yang besar terhadap universitas. Dal hal tersebut merupakan pertanyaan tersendiri antara relevansi publik dan pengetahuan profesional.

Delanty (2001) menawarkan pemikiran bahwa pergeseran kognitif yang terjadi saat ini merupakan kemerosotan dari “*enlightment's republic of science*”. Ia juga berpendapat bahwa meningkatnya kritik publik, kebutuhan akan demokratisasi telah berpenetrasi ke dalam jantung “kognitif rasional” dalam rangka akuntabilitas publik dari ilmu itu sendiri. Tentunya

pergeseran kognitif ini dapat dilihat sebagai sesuatu yang komunikatif, tetapi sekaligus juga sebagai yang di tantang oleh pemahaman neoliberal dari universitas. Hanya sekali saja universitas berada di tempat yang aman yaitu pada masa pemerintahan negara di era *enlightment*, saat ini universitas berada dalam pendakian bukit “bentuk-bentuk pergeseran pengetahuan” yang tak pasti, tepat pada saat pemerintah negara memasuki periode kemunduran. Era “*big science*”, telah menderita karena nasib dari “*big government*”: legitimasinya sudah pergi tetapi realitasnya masih tertinggal. Tidak lagi terlindungi oleh demokrasi, logika komunikatif rasionalitas telah masuk ke akademi untuk mempertanyakan model-model kognitif lama dari netralitas, universitas dan obyektifitas.

Panorama yang lebih kompleks dan dinamis akan didapatkan apabila berhasil dipotret hubungan antara negara dan universitas sebagai struktur-struktur obyektif dan kognitif yang berinteraksi. Praktik pengelolaan hutan oleh negara sebagai struktur obyektif dapat menjadi sebuah realita subyektif pada struktur kognitif individu yang terpengaruh juga dari struktur sosial di mana individu itu berada. Tulisan ini bertujuan melihat *interplay* realita pengelolaan hutan oleh negara sebagai sebuah struktur obyektif dengan struktur kognitif universitas yang sedianya sebagai produser pengetahuan yang harus mendayung dan berdamai di atas dua kepentingan, pemberi solusi teknis negara dan akomodator logika pasar.

II. METODOLOGI

A. Kerangka Teoretik

Germany scientific forestry sebagai kaidah pengelolaan sumberdaya hutan pada era kolonial secara simultan diadopsi sebagai landasan pengelolaan hutan oleh negara -setidaknya sampai pada era Orde Baru, dan sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan oleh lembaga pendidikan kehutanan khususnya pendidikan tinggi atau universitas. *Scientific forestry* dewasa ini dianggap menemui kebuntuannya dalam menjawab tantangan kelestarian hutan dan kelestarian hasil hutan yang dituntut makin beragam derivatnya. Kala ini negara mengklaim *community-based forest management* -sebagai diskursus baru, sebagai kaidah pengelolaan hutan yang perlu untuk dikembangkan menggantikan *scientific forestry*. Bagaimana dengan universitas yang juga mengusung paham *scientific forestry*, apakah juga telah merubah cara pandangnya terhadap *scientific forestry*? *Scientific forestry* sebagai sebuah kaidah pengelolaan hutan yang telah lama hidup di dalam pikiran individu-individu pelaku pengelola hutan baik itu aparat negara, ilmuwan, pengajar maupun praktisi kehutanan menghasilkan praktik-praktik kehutanan tertentu. Praktik-praktik kehutanan yang dilakukan oleh para aktor tersebut tentunya juga mempengaruhi pikiran aktor-aktor tersebut. Terdapat hubungan yang interaktif antara struktur praktik dan pikiran para aktor.

Tawaran pemikiran Pierre Bourdieu tentang struktur sebagai sebuah lingkungan (*field*) dan struktur yang menghasilkan sistem kognitif (*habitus*) tertentu menjadi landasan teoretik dalam tulisan ini. Untuk menggambarkan perhatiannya terhadap hubungan dialektika antara struktural dan cara orang membangun realitas sosial, Bourdieu memberi label orientasi teoritisnya sebagai “strukturalisme konstruktivis”. Seperti dikatakannya bahwa karya Bourdieu bertujuan untuk menanggulangi pertentangan struktur obyektifisme dan struktur subyektifisme (Bourdieu, 1989) memberi analisa struktur obyektif dan mental individu sebagai struktur obyektif berbeda dengan para strukturalis dan konstruktivis sebelum-sebelumnya. Menurut Bourdieu, analisis struktur obyektif tak dapat dipisahkan dari analisis

asal-usul struktur mental individual yang, hingga taraf tertentu, merupakan produk penggabungan struktur sosial; juga tak dapat dipisahkan dari analisis asal-usul struktur sosial itu sendiri; ruang sosial dan kelompok yang menempatinya adalah produk dari perjuangan historis (dimana agen berpartisipasi sesuai dengan posisi mereka di dalam ruang sosial dan sesuai dengan struktur mental yang menyebabkan agen dapat memahami ruang sosial ini). Pemahaman struktur dan obyektif dan struktur subyektif Bourdieu berdiri diantara pemahaman *mainstream* kala itu. Dari eksistensialisme Jean-Paul Sartre, Bourdieu mendapatkan pemahaman yang kuat tentang aktor sebagai kreator dunia sosialnya. Akan tetapi, Bourdieu merasa bahwa Sartre melangkah terlampaui jauh dan memberi terlalu banyak kekuasaan kepada aktor dan dalam proses itu dia mengabaikan batasan struktural terhadap para aktor itu. Karena tertarik ke arah struktur, Bourdieu beralih ke karya-karya strukturalis *mainstream* terkemuka, Levi-Strauss. Dia keberatan terhadap fakta bahwa para strukturalis memandang diri mereka sebagai pengamat istimewa terhadap orang lain yang diasumsikan akan dikontrol oleh struktur yang tak mereka sadari. Bourdieu mendefinisikan salah satu tujuan dasarnya dalam reaksi terhadap ekse strukturalisme : niat saya adalah mengembalikan kehidupan nyata aktor yang telah dilenyapkan ditangan Levi-Strauss dan strukturalis lainnya yang menganggapnya sebagai epifenomena struktur, dengan kata lain Bourdieu ingin mengintegrasikan setidaknya sebagian dari eksistensialisme Sartre dengan strukturalisme Levi-Strauss (Ritzer dan Goodman, 2003)

1. *Habitus dan Field*

Tawaran pemikiran Bourdieu dijiwai oleh hasrat untuk menanggulangi apa yang ia anggap kekeliruan dalam mempertentangkan antara obyektivisme dan subyektivisme. Untuk orientasi teorinya ini, Bourdieu menggunakan istilah *habitus* dan *field*. *Habitus* merupakan struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Aktor dibekali serangkaian skema atau pola yang diinternalisasikan yang mereka gunakan untuk merasakan, memahami, menyadari dan menilai dunia sosial. Melalui pola-pola itulah aktor memproduksi tindakan mereka dan juga menilainya. Secara dialektika *habitus* merupakan produk internalisasi struktur dunia sosial (Bourdieu, 1989). Dalam pengertian ini *habitus* dapat pula menjadi fenomena kolektif. *Habitus* memungkinkan orang memahami dunia sosial, tetapi dengan adanya banyak *habitus* berarti kehidupan sosial dan strukturnya tak dapat dipisahkan seragam kepada seluruh aktor. *Habitus* yang ada pada waktu tertentu merupakan hasil ciptaan kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode historis yang relatif panjang : *habitus*, yang merupakan produk historis, menciptakan tindakan individu dan kolektif dan karenanya sesuai dengan pola yang ditimbulkan oleh sejarah (Bourdieu, 1977 dalam Ritzer 2003).

Habitus menghasilkan, dan dihasilkan oleh, kehidupan sosial. Disatu pihak, *habitus* adalah struktur yang menstruktur (*structuring structure*); artinya *habitus* adalah sebuah struktur yang menstruktur kehidupan social. Di lain pihak, *habitus* adalah strukur yang menstruktur (*structured structure*); yakni, ia adalah struktur yang distrukturisasi oleh dunia sosial. Dengan kata lain, Bourdieu melukiskan *habitus* sebagai dialektika internalisasi dari eksternalitas dan eksternalisasi dari internalitas. Konsep *habitus* menurut Ritzer (2003), memungkinkan Bourdieu lari dari keharusan memilih antara sosiokultural subyektivisme dan obyektivisme, lari dari pemikiran filsafat tentang subyek tanpa melepaskan diri dari pemikiran tentang agen. Menghindarkan diri dari filsafat tentang struktur tetapi tak lupa memperhatikan pengaruhnya terhadap dan melalui agen.

Tindakanlah yang mengantarai *habitus* dan kehidupan sosial. Di satu pihak, *habitus* diciptakan melalui praktik (tindakan); di pihak lain, *habitus* adalah hasil tindakan yang diciptakan kehidupan sosial. Bourdieu mengungkapkan fungsi perantara tindakan ketika ia mendefinisikan *habitus* sebagai sistem yang tertata dan menata kecenderungan yang ditimbulkan oleh tindakan dan terus menerus tertuju pada fungsi praktis (Wacquant, 1989 dalam Ritzer, 2003). Sementara tindakan atau praktik cenderung membentuk *habitus*, *habitus*, pada gilirannya, berfungsi sebagai penyatu dan menghasilkan praktik/tindakan.

Field (lingkungan) menurut Bourdieu (1989) adalah jaringan hubungan antarposisi obyektif di dalamnya hal ini tentunya lebih bersifat relasional ketimbang struktural. Keberadaan hubungan ini terlepas dari kesadaran dan kemauan individu. *Field* bukanlah interaksi atau ikatan *field* bukanlah intersubyektif antara individu. Penghuni posisi mungkin agen individual atau lembaga, dan penghuni posisi ini dikendalikan oleh struktur *field*. Bourdieu melihat *field* sebagai sebuah arena pertarungan : *field* adalah juga lingkungan perjuangan (Bourdieu dan Wacquant, 1992). Struktur *field*-lah yang menyiapkan dan membimbing strategi yang digunakan penghuni posisi tertentu (secara individual atau kolektif) yang mencoba melindungi atau meningkatkan posisi mereka untuk memaksakan prinsip penjenjangan sosial yang paling menguntungkan bagi produk mereka sendiri. *Field* adalah sejenis pasar kompetisi di mana berbagai jenis modal (ekonomi, kultur, sosial, simbolik) digunakan dan disebar. *Field* juga adalah lingkungan politik (kekuasaan) yang sangat penting; hirarki hubungan kekuasaan di dalam lingkungan politik membantu menata semua lingkungan yang lain.

Penghuni posisi dalam lingkungan menggunakan berbagai strategi. Gagasan ini sepertinya menunjukkan bahwa, menurut Bourdieu, aktor mempunyai derajat kebebasan tertentu. *Habitus* tidak meniadakan peluang untuk membuat perhitungan strategis di pihak agen. Tetapi strategi tak mengacu pada tujuan dan rencana mengejar tujuan yang sudah diperhitungkan. Tetapi mengacu pada perkembangan aktif garis tindakan yang diarahkan secara obyektif yang menaati aturan dan membentuk pola yang koheren dan secara sosial dapat dipahami, meskipun tak mengikuti aturan yang ditetapkan secara sadar atau tertuju pada tujuan yang diterapkan sebelumnya oleh seorang penyusun strategi.

Bourdieu melihat negara sebagai tempat untuk bertarung memperebutkan monopoli atas kekerasan simbolik. Ini adalah bentuk lunak dari kekerasan yang digunakan terhadap agen sosial dengan keterlibatannya. Kekerasan simbolik adalah tindakan tak langsung yang umumnya melalui mekanisme kultural dan berbeda dari bentuk-bentuk kontrol yang lebih langsung. Sistem pendidikan merupakan lembaga utama tempat mempraktikkan kekerasan simbolik terhadap individu (Bourdieu dan Passeron, 1970/1990 dalam Ritzer 2003). Lebih umum lagi, Bourdieu melihat system pendidikan sangat besar perannya dalam mereproduksi dan melestarikan relasi kekuasaan dan hubungan kelas yang ada.

Dalam menekankan pentingnya *habitus* dan lingkungan, Bourdieu sepertinya menolak untuk memisahkan antara metodologi individualis dan metodologi menyeluruh, dan menerima pendirian yang akhir-akhir ini disebut relasionalisme metodologis (Ritzer dan Gindoff, 1992 dalam Ritzer, 2003). Bourdieu memusatkan perhatiannya pada hubungan antara *habitus* dan lingkungan. Hubungan ini berperan dalam dua cara. Di satu pihak, lingkungan mengkondisikan *habitus*; di pihak lain, *habitus* menyusun lingkungan, sebagai sesuatu yang bermakna, yang mempunyai arti dan nilai.

2. *Pengetahuan sebagai Field*

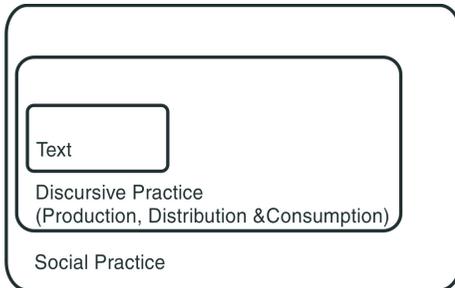
Bourdieu (1991) memberi tawaran analisis pengetahuan (*science*) sebagai *field*. Tesis Bourdieu adalah bahwa pengetahuan merupakan *field* kekuasaan, perjuangan dan hubungan-hubungan yang terus-menerus ditentukan oleh hubungan-hubungan kekuasaan diantara para pelaku utama yang bersinggungan. Pilihan keilmiah dituntun oleh asumsi-asumsi *take for granted*, interaktif dengan praktik yang membentuk masalah-masalah riil dan penting, metoda-metoda yang valid dan pengetahuan yang otentik. Pilihan keilmiah tersebut juga dibentuk oleh modal sosial yang dikendalikan oleh posisi tertentu dan sikap mental di dalam *field*. Representasi pengetahuan yang kompleks dan dinamis ini berimplikasi secara simultan pada penolakan konsepsi *absolutist-idealist* yang memandang pengembangan pengetahuan terjadi secara terus-menerus yang mengekspresikan dunia nyata sebagaimana adanya sebagai sebuah kenyataan (sebutan lain konsepsi ini adalah representasionisme). Berdiri sebagai oposisi konsepsi tersebut adalah *historicist relativism* yang menyadari bahwa pengetahuan sebagai hasil dari konstruksi sosial, sebagai sesuatu yang konvensional, yang merefleksikan struktur-struktur obyektif dan kepercayaan pada alam semesta sosial tertentu.

Menurut Bourdieu ada beberapa area kehidupan intelektual yang familiar dengan pilihan antara analisis internal dan eksternal terhadap pengetahuan. Internal analisis memandang praktik pengetahuan sebagai aktifitas murni yang seutuhnya terlepas dari determinasi ekonomi dan sosial dimana analisis eksternal melihat pengetahuan sebagai hasil refleksi struktur-struktur ekonomi dan sosial. Pilihan-pilihan tersebut, dengan tegas di katakan oleh Bourdieu, muncul karena sesuatu yang dianggap oleh Bourdieu sebagai “*very high stakes*” yaitu : siapapun yang terlibat, pada kenyataannya adalah tidak lebih dari kemungkinan (*possibility*) untuk menerapkan “*the genetic mode of thinking*”, yang mana hal tersebut adalah pengetahuan itu sendiri, untuk pengetahuan itu sendiri yang kemudian memposisikan orang-orang yang berkompeten, seolah-olah menemukan alasan-alasan itu semua, dimana kegiatan berfikir sebagai kegiatan yang bebas dari sejarah tetapi kegiatan tersebut mempunyai sejarah tersendiri. Pilihan semacam ini, pada kasus ini, menurut Bourdieu (1991) sebagai sesuatu yang memenjarakan pemikiran : secara brutal membatasi ruang yang dapat dipikirkan dan yang tidak terpikirkan dengan mereduksi ruang kemungkinan-kemungkinan teoretis untuk mendampingi oposisi dasar, diluar yang mana tidak adanya posisi yang mungkin.

B. Kerangka Analisis

Penelitian ini berusaha memahami paradigma perguruan tinggi kehutanan di Indonesia, dan bagaimana sebuah struktur ideologi pengelolaan hutan direproduksi dan direformasi secara simultan. Untuk dapat memahami struktur kognitif dan struktur obyektif sekaligus paradigma pengelolaan hutan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, digunakan analisa diskursus kritis (*Critical Discourse Analysis*) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Metode ini berpijak pada asumsi bahwa diskursus atau wacana tidak semata alat deskripsi atau media komunikasi tetapi sebuah praktek sosial dalam lapangan sosiologis, lebih jauh Norman berpendapat bahwa ada hubungan dialektis antara wacana dengan struktur sosial, dimana wacana dikondisikan dan dipengaruhi oleh struktur sosial dan disisi yang lain wacana menjadi dasar bagi kehidupan sosial; wacana berpengaruh dalam perumusan hukum-hukum sosial yang secara langsung dan tidak langsung membentuk dan membatasi kehidupan sosial. Konsep analisa diskursus ini memiliki tiga dimensi atau level analisa yaitu : *pertama*, teks dengan meneliti dimensi bahasa; *kedua*, dimensi praktek diskursif

dengan mengkaji proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks dan; *ketiga*, adalah dimensi praktek sosial seperti kondisi institusional dan situasional yang membentuk sebuah praktek diskursif. Ketiga dimensi diatas merupakan level analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1 (Figure 1). Konsep Diskursus Tiga Dimensi (Fairclough, 1992) (*Three dimension discourse concept*)

Bagaimanakah wacana terbangun dan muncul dalam wujud teks? Bagaimanakah teks-teks hadir dan berbicara mengenai perubahan-perubahan dan keterhubungan wacana-wacana yang berkembang sedemikian rupa dalam kehidupan sosial. Pendekatan CDA memberikan urutan analisis dalam memahami gejala-gejala sosial dan perubahannya melalui teks. Menganalisa teks bisa menjadi salah satu pintu masuk awal dalam memahami dinamika wacana yang berkembang dalam suatu isu atau topic tertentu. Pendekatan yang coba dikemukakan dalam mengkaji dimensi teks buku ini adalah melalui metode *framing analysis* yang mencoba menggambarkan teks dari dua aspek (William Gameson & Modgialini dalam Sobur, 2001). Pendekatan ini menganalisis aspek strategi penonjolan fakta-fakta yang mempengaruhi pembaca memahami perspektif tertentu. Aspek Pertama adalah *framing devices*, proses dimana penekanan gagasan, pemunculan ide sentral, juga bingkai yang menekankan fokus tertentu dalam media teks; proses ini ditandai oleh pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar dan metaphor tertentu. Kedua adalah *reasoning devices* yang berhubungan dengan kohesi dan koherensi teks-teks yang muncul dalam proses pembingkai di atas. Secara lebih detail analisis itu akan menekan analisis yang ditunjukkan dalam table di bawah.

Metode analisis ini akan digunakan dalam mengkaji teks-teks yang membahas buku pengajaran Pengantar Ilmu Kehutanan yang ditulis oleh Endang Suhendang. Buku ini telah diterbitkan oleh Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan (YPFK). Buku ini telah diterbitkan dalam dua cetakan, cetakan pertama diterbitkan Juli 2002, dan bulan berikutnya diterbitkan lagi. Buku ini terdiri dari sembilan bab yang mencakup berbagai topik berkenaan dengan paradigma tentang kehutanan di Indonesia. Beberapa bab yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah, Bab 3 (Hutan, Kehutanan, dan Ilmu Kehutanan), Bab 4 (Mengapa Manusia Memerlukan Hutan?), Bab 6 (Peranan Hutan Dalam Pembangunan di Indonesia), Bab 7 (Pengurusan Hutan di Indonesia), Bab 8 (Rimbawan Sebagai Sebuah Profesi), dan terakhir adalah Bab 9 (Pengantar ke Kehutanan Internasional).

Tabel (Table 1). Perangkat Framing Gamson dan Modgialini (*Framing Gamson & Moggialini tools*)

Perangkat Framing	Perangkat Penalaran
Mataphors Perumpamaan atau pengandaian	Roots Analisa kausal atau sebab akibat
Catchphrases Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana Umumnya berupa jargon atau slogan	Appeals to Principle Prinsip dasar klaim-klaim moral
Exemplaar Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (berupa teori atau perbandingan) Yang memperjelas bingkai	Consequenses Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai
Depiction Penggambaran atau penulisan suatu isu yang bersifat konotatif	
Visual Image Gambar. Grafik, citra yang mendukung gambar secara keseluruhan	

Sumber : Eriyanto (2001)

C. Metode pengambilan data

Seperti telah disebutkan diatas, analisa teks dilakukan pada buku teks ”Pengantar Ilmu Kehutanan” yang merupakan buku teks wajib mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB. Walaupun buku teks tersebut merupakan tulisan dari salah seorang pengajar, bukan merupakan pemikiran dari seluruh pengajar namun setidaknya buku tersebut dapat menggambarkan pemikiran salah seorang Guru Besar di Fakultas Kehutanan IPB yang telah melalui perubahan-perubahan sistem kognitif institusi Fakultas Kehutanan IPB. Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap beberapa pengajar di lingkup fakultas dilakukan untuk membangkitkan data yang digunakan untuk triangulasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Tentang Hutan: Perluasan dan Modifikasi Konseptual

Paradigma *Scientific Forestry* menuju *Community Forestry* digambarkan secara gamblang dalam penjelasan historis mengenai penjelasan definisi-definisi tentang hutan berdasarkan kategori-kategori. Kategori tersebut meliputi kategori berdasarkan penekanan konsep ekologisnya, tujuan kegiatan tertentu, status hukum dan undang-undang, keadaan tumbuhan hutan, asal hutan/ cara pembentukan hutan, tahapan pertumbuhan/perkembangan tegakan, komposisi jenis pohon, letak geografis dan ketinggian tempat, iklim tempat tumbuh hutan, keadaan tanah, faktor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi, berdasarkan fungsinya, status hukum fungsi penggunaan hutan, dan terakhir status hukum lahan hutan.

Salah satu kategori definisi hutan menjelaskan beberapa hal yang terhubung erat dengan paradigma *Community Forestry*. Hal tersebut adalah status hukum lahan hutan. Pengertian dan kategori yang dibangun dibuat berdasarkan dimensi sosio-kultural penggunaan hutan disertai kejelasan hukum yang terbangun dalam mendefinisikannya. Penulis buku membagi kategori dan penjelasan dalam melihat kepemilikan dan penggunaan lahan hutan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaannya. Ia membagi kategori yang terbangun ke dalam enam kategori yang dibangun, *pertama*, adalah hutan negara, hutan ini pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. *Kedua*, hutan hak ini menjelaskan bahwa hak pengelolaan hutan dimiliki oleh orang yang memiliki hak tanah di tempat tersebut. *Ketiga*, adalah hutan adat, hutan yang berada pada tanah yang berada dalam wilayah masyarakat adat. *Keempat*, adalah hutan masyarakat (*Community Forest*), hutan ini dimiliki dan dikelola oleh masyarakat dan masing-masing anggotanya berperan serta dalam pengelolaan dan mendapatkan manfaat dari hutan tersebut. *Kelima*, adalah hutan komunal, hutan ini dikelola dan dimiliki oleh pemegang kekuasaan di desa, kota, masyarakat adat, atau pemerintah setempat. Sedangkan yang terakhir adalah pengertian hutan rakyat (*Social Forest*), yaitu lahan milik rakyat/adat/ulayat yang terus menerus diusahakan untuk usaha perhutanan baik itu tumbuh secara alami maupun buatan.

Dalam pendefinisian hutan tersebut terlihat penekanan-penekanan aspek komunitas yang berperan dalam kepemilikan dan pengelolaan. Sisi komunalitas dari pengelolaan hutan di tekankan. Meskipun pada batas tertentu menunjukkan kerancuan dari kemunculan kategori seperti hutan komunitas, hutan komunal, hutan adat. Definisi-definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa aspek komunitas dalam pengelolaan hutan yang dirumuskan dalam buku pengantar ini dicoba di bingkai ke dalam pemahaman definisi hutan. Pengertian yang dibangun dibuat berdasarkan perkembangan perundang-perundangan maupun pemikir luar.

Di Bab selanjutnya penulis buku bahkan menjelaskan ketegasan interaksi hubungan antara manusia, hutan, lahan selain hutan, dan flora fauna di luar hutan. Penulis menamakan sistem tersebut sebagai lingkungan sistem kehutanan yang meliputi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Ketegasan dalam menjelaskan hubungan hutan dengan manusia-manusia yang terlibat di sekitarnya menunjukkan bagaimana pemikiran tentang *community forestry* coba di jelaskan dalam pengetahuan mendasar dalam ilmu kehutanan yaitu definisi hutan. Ilmu kehutanan yang memang tidak murni berkembang dari negara-negara dunia ketiga tentunya memerlukan definisi yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut. Bingkai dan penekan isu ini nampaknya dimunculkan penulis dalam buku ini.

Beberapa isu lain yang menggambarkan penggambaran orientasi pergeseran kajian kehutanan adalah penjelasan sistemik penulis buku dalam melihat fungsi hutan dengan keterhubungan wilayah hutan dan pengelolaan pemukiman dan kehutanan. Pemikiran ini diperoleh dari Stedman dan Edwards yang mengemukakan model siklus perubahan penggunaan hutan untuk lahan pertanian. Selain itu gagasan bahwa hutan juga terkait dengan *Ecotourism* atau objek rekreasi juga menjelaskan dimensi keterlibatan komunitas dalam penulisan kurikulum ilmu kehutanan. Meskipun pada batas tertentu detail hubungan itu tidak dijelaskan dengan gamblang, Bab 4 menceritakan bagaimana interpretasi penulis menggambarkan kerangka perspektif sistemik yang menjelaskan juga interaksinya dengan aspek sosial atau komunitas dalam menjelaskan fungsi hutan.

Perluasan penjelasan dan kategori berdasarkan fungsi mengenai definisi hutan, dan beberapa hal yang menganalisis hutan sebagai kerangka sistemik dan melihat peranan manusia dan komunitas nampak eksplisit dikemukakan dalam kurikulum pengajaran ilmu kehutanan. Hal tersebut menunjukkan perluasan dan modifikasi konseptual dari pengertian

hutan itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh William Gameson & Modgialini dalam Sobur (2001), menunjukkan alat pembimbingan dan penalaran dalam memahami gejala-gejala dalam isu-isu kehutanan. Jika dilihat dalam kerangka/alat penalaran kita bisa melihat koherensi dan kohesi dalam mengaitkan isu hutan yang sebelumnya berfokus pada hutan *an sich*, menjadi terhubung dengan aspek manusia dan komunitasnya. Urutan sistematika penulisan dan penelusuran referensi membimbing penegasan dan penekanan atas aspek *Community forestry* dalam kurikulum ilmu kehutanan.

B. Narasi Sejarah Pengurusan Hutan Indonesia: Interpretasi Atas Perubahan Pengurusan Kehutanan

Penulisan sejarah pengurusan hutan di Indonesia oleh penulis dirangkum dan dikategorikan berdasarkan periodisasi politik/rezim dan perubahan dalam aktor-aktor atau pihak berwenang yang mengelola dan mempengaruhi kondisi pengurusan hutan di masing-masing periode tersebut, dan berlingkup selama kurang lebih empat ratus tahun yang lalu. Meskipun dijelaskan beberapa lingkup dari kegiatan pengurusan hutan, penjelasan yang coba dikemukakan berbicara dalam struktur dan sistematika yang menunjukkan model historis dalam pemaparannya. Model historis ini kemudian dilihat dalam beberapa kategori yang menjelaskan beberapa lingkungannya berdasarkan fase-fase pengelolaan dan manajemen kegiatan membangun, meregenerasikan, membina, memanfaatkan, dan mengkonservasikan hutan.

Pada bab ini penggambaran pergeseran paradigmatik dalam pengelolaan hutan tampak eksplisit di setiap periode. Periode Kongsi dagang dan hindia belanda menunjukkan beberapa pengertian berbeda dari pengelolaan kehutanan dibandingkan sekarang. Pada periode ini kepemilikan hutan dan pengelolaan banyak dipegang oleh penguasa-penguasa seperti raja dan penguasa daerah seperti residen atau sunan. Pihak penguasa daerah ini pada beberapa kasus menyewakan juga ke pihak asing seperti kongsi-kongsi dagang belanda. Pada periode awal inilah paradigma bahwa hutan adalah milik Negara. Istilah itu dikenal sebagai domain yang diatur oleh pasal satu dalam keputusan agrarian tahun 1870. Tanah menjadi salah satu bentuk manifestasi kekuasaan raja. Pada bab selanjutnya ia mengemukakan bagaimana perubahan kepemilikan hutan. Sebelumnya hutan memang dimiliki oleh kekuasaan akan tetapi masih terfragmentasi dan digenggam oleh penguasa-penguasa lokal, pada periode berikutnya hak atas hutan dimiliki secara terpusat dan berada dibawah sebuah dinas yang ditunjuk oleh gubernur jendral dari kekuasaan baru, Hindia Belanda. Pada periode berikutnya yaitu pada tahun 1850-1942, pengelolaan dan kepemilikan hutan diatur oleh ahli-ahli kehutanan yang dididik oleh pemerintahan hindia belanda. Hal yang muncul kemudian menjadi cikal bakal paradigma *Scientific Forestry* di Indonesia. Dalam periode ini dimunculkan penggolongan hutan berdasarkan jenis tanaman, yaitu hutan jati dan hutan rimba dan diatur secara terpusat. Pada periode definisi hutan Negara dipertegas oleh pemerintahan. Periode selanjutnya yang digambarkan oleh teks-teks dalam buku pengajaran ilmu kehutanan adalah periode Jepang. Dilanjutkan kemudian dengan pembahasan konsep pengelolaan hutan pada periode kemerdekaan, dari Pemerintahan Soekarno hingga Soeharto. Konsep-konsep mendasar dalam pengurusan hutan hingga periode ini masih melihat hutan sebagai sebuah lahan dan area dimana manusia dan komunitas tidak berperan di dalamnya, meskipun pada akhir-akhir pemerintahan orde baru perhatian terhadap partisipasi masyarakat sudah mulai dibahas oleh penulis buku. Perubahan pesat baru bisa terlihat ketika penulis mulai menggambarkan suatu isu baru dalam pengelolaan kehutanan, yaitu periode

pasca reformasi. Penggambaran sistematis berdasarkan sub bab-sub bab diatas menjelaskan koherensi dalam menginterpretasi pergeseran paradigma pengelolaan hutan di Indonesia.

Penegasan itu bisa terlihat dari penjelasan pada periode reformasi dan pandangan penulis tentang pengurusan Hutan di masa yang akan datang. Beberapa hal yang dimunculkan pada periode ini adalah bahasan tentang otonomi daerah dan implikasi ratifikasi perjanjian yang mengkondisikan keterlibatan pihak pemerintahan daerah dalam pengelolaan dan kepemilikan hutan di wilayahnya masing-masing. Pemaparan kemudian semakin dijelaskan dalam perspektif buku tersebut dalam melihat pengurusan hutan yang ideal di masa yang akan datang. Uraian mengenai permasalahan yang muncul dari periode sebelumnya, dan rekomendasi penulis, sebagai aktor yang mengartikulasikan paradigma dari kalangan ilmuwan kehutanan, dalam pengelolaan hutan menunjukkan ketegasan bahwa masalah kehutanan akan bisa dikelola lebih baik dengan kebijakan desentralisasi dan keterlibatan partisipasi masyarakat di tingkat daerah. Penempatan perkembangan pengelolaan kehutanan dalam bentuk urutan kronologis dan perekomendasi yang dikemukakan oleh buku tersebut menunjukkan sistematika dan penekanan beberapa gagasan mengenai konsep *Community Forestry*.

Sub bab selanjutnya memberikan beberapa penonjolan aspek-aspek *Community Forestry* secara lebih mendetail melalui gagasan-gagasan sistem kepengurusan hutan yang menjelaskan peralihan sistem kepemilikan hutan, desentralisasi dalam pengurusan hutan, mekanisme pengurusan hutan, dan prinsip-prinsip baru dalam pengelolaan hutan. Beberapa teks yang menjelaskan pentingnya aspek *community forestry*, yang dikemukakan dalam sub bab sistem kepemilikan hutan, yaitu:

.....untuk ini (pengurusan hutan,-pen) diperlukan pembahasan yang berlandaskan pada pengetahuan dan pemahaman konsepsi ilmiah yang sangat kuat serta kearifan yang tinggi, dengan melibatkan seluruh komponen yang yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang ini. Akan tetapi, tanpa harus menunggu selesainya penyempurnaan permasalahan ini, aksesibilitas masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan hutan harus ditingkatkan. Caranya adalah melalui pengembangan pola pengelolaan hutan yang lebih memihak kepada kepentingan masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan. (Suhendang, 2002: 184)

Secara lebih spesifik, penjelasan prinsip hutan menyebutkan pentingnya kelestarian fungsi sosial dari pengurusan hutan. Prinsip itu dipertegas lagi dengan penyebutan kriteria-kriteria yang harus diwujudkan demi terwujudnya kelestarian fungsi sosial dari Hutan, yaitu terjaminnya sistem tenurial hutan komunitas, terjaminnya ketahanan dan pengembangan komunitas dan karyawan, terjaminnya keberlangsungan integrasi sosial dan kultural komunitas dan karyawan, realisasi tanggung jawab rehabilitasi status gizi dan penanggulangan dampak kesehatan, serta yang terakhir adalah terjaminnya atas hak-hak atas tenaga kerja.

Bab ini merupakan salah bab yang merepresentasikan paradigma kehutanan di kalangan akademisi universitas. Narasi mengenai sejarah pengurusan hutan dan pengelolaan hutan di Indonesia secara historis menunjukkan perubahan defragmentasi kekuasaan melalui perubahan-perubahan politik-ekonomi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Perubahan yang berimbas pada perubahan kepemilikan dan pengelolaan hutan di Indonesia.

C. Konvensi-Konvensi Kehutanan Internasional dan KHI : Formasi Wacana Dalam Produksi Pengetahuan

Poin-poin pemahaman tentang pengurusan hutan internasional dijelaskan pada bab 9. Bab ini merupakan teks yang dominan menarasikan produksi dan reproduksi wacana yang terjadi dalam lingkup gejala-gejala mengenai pengelolaan hutan di Indonesia. Konvensi-konvensi, kesepakatan, perjanjian, ratifikasi, dan berbagai kesepakatan yang dibangun dalam lingkup internasional mengenai pengelolaan hutan dijelaskan secara mendetail dalam sebuah benang merah paradigma *Community Forestry*. Pemaparan mendetail tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan pengelolaan hutan yang berkesinambungan (*Sustainable Forest Management*) di bingkai dalam beberapa kerangka-kerangka kerja yang melibat berbagai pihak. Keterhubungan berbagai isu dalam alur sistematika penulisan menunjukkan metafor perkembangan diskursus dalam tingkat tekstual mengenai gejala formasi wacana dalam badan teks bab ini.

Pembahasan diawali pemaparan problem-problem yang muncul dalam kehutanan dalam skala global. Penekanan aspek sejarah dari kemunculan ancaman terhadap keberadaan dan kelestarian fungsi hutan Indonesia, pemaparan fungsi ekologis hutan secara global, perkembangan industri, sosial budaya, dimensi geopolitik diuraikan dalam berbagai kerangka pemikiran yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan kehutanan dari luar. Pemaparan tersebut sebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan perkembangan perhatian masyarakat internasional dalam penjelasan perhatian permasalahan global kehutanan. Penulisan 4 deklarasi yang dikemukakan mengenai perhatian masyarakat global dalam mensikapi problem yang muncul dalam kehutanan internasional dijelaskan, yaitu kongres kehutananan se-dunia ke-5 tahun 1960 di Seattle, Amerika Serikat, Deklarasi Stockholm, Deklarasi di Jakarta tentang Hutan untuk kesejahteraan masyarakat, dan Deklarasi Rio untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan.

Penulisan menarik lainnya adalah *Canada Forest Accord Our Forest* yang dibuat pada tahun 1992, ditanda tangani oleh 27 pihak, terdiri dari para menteri Negara bagian yang bertanggung jawab dalam pengurusan hutan (12 orang), dan 15 orang yang mewakili asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan kehutanan yang terdapat di Kanada (Suhendang, 2002: 266). Poin-point dari Kesepahaman bersama yang dikemukakan menggambarkan pandangan paradigma kehutanan para praktisi di negeri Kanada. Kesepahaman itu menekankan pentingnya kehutanan bagi masyarakat kanada bagi beragam komunitas yang terlibat dalam kesinambungan pengelolaan dan kelestariannya. Di Indonesia kegiatan serupa juga dilaksanakan, akan tetapi menariknya dilakukan dan diinisiatifkan oleh Himpunan Alumni Kehutanan IPB (H.A. Fahutan IPB) sebagai salah *one stake holder* dalam pengelolaan kehutanan. Kegiatan ini pada akhirnya merumuskan rekomendasi atau usulan konsep rumusan KHI versi H.A. Fahutan IPB. Penulis di sini mengkontraskan beberapa factor yang menjelaskan kemunculan perubahan paradigma *Scientific Forestry* menjadi *Community Forestry*. Sebelumnya di kalangan pemerintah kanada kesepahaman justru dilakukan oleh praktisi dan asosiasi profesi, sedangkan di Indonesia justru diusulkan oleh lembaga yang terikat pada suatu institusi pendidikan tinggi, yaitu H.A. Fahutan IPB pada tahun 2002.

D. Teks dan Praksis Diskursus Teks Ilmu Kehutanan

Critical Discourse Analysis (CDA) merupakan salah satu pendekatan yang membedakan gejala diskursus dalam masyarakat dengan memfokuskan hubungan antara proses produksi, proses interpretasi, dan distribusi teks-teks dengan gejala-gejala yang terkait (Fairclough,

1992). Gejala yang muncul dalam formasi diskursus pengelolaan hutan di Indonesia menggambarkan keterhubungan diskursus yang memungkinkan paradigma *Community Forestry* bisa menjadi mapan dan muncul dalam teks-teks mendasar mengenai pengelolaan kehutanan di ranah produksi pengetahuan universitas. Universitas sebagai institusi yang memproduksi dan mereproduksi pengetahuan menjadi arena relasi kekuasaan yang memantapkan dan mengendurkan gejala-gejala diskursif, tidak terkecuali paradigma pengelolaan kehutanan. Detail-detail proses dari kemunculan gejala tersebut dalam tulisan ini dikaji melalui pendekatan CDA yang menjelaskan gejala relasi sosio-kultural yang tidak pernah terlepas dari kemunculan diskursus-diskursus yang diproduksi dan direproduksi melalui keterhubungan masing-masing diskursus lain yang saling terkait.

Secara historis, paradigma *community forestry* yang muncul dalam teks buku pengantar kehutanan tidak terlepas juga dari diskursus yang berkembang sebelumnya, yaitu *Scientific Forestry*. *Scientific Forestry* seperti telah di paparkan dalam Bab Kesatu, merupakan sebuah diskursus yang menemukan lahan suburnya dalam sebuah relasi kuasa yang asimetris dan terpusat seperti era kolonial, dimana hutan sepenuhnya menjadi objek komoditas yang harus dikelola secara “benar” berdasarkan kalkulasi dan eksperimen ilmiah demi perolehan laba negara. Ketika relasi kuasa mencair dan simetris dengan sendirinya akan terbuka kontestasi diskursus-diskursus alternatif, dan disinilah demokrasi berperan penting sebagai arena kontestasi diskursif. Benang merah sejarah ini berjalan dalam hubungan dua dimensi, yaitu dimensi sosio-historis dari perkembangan teori-teori kehutanan di Indonesia, dan dimensi relasi struktur politik dan ekonomi yang melingkupi gejala dinamik dari pengelolaan hutan di Indonesia.

Dimensi sosio historis dari perkembangan teoritik sudah diawali dengan relasi pusat-pinggiran (*center-periphery*) dalam konteks konstelasi paradigma ilmu antara barat dan bukan barat. Hal tersebut tercermin dalam formasi diskursus mengenai definisi hutan dan pengelolaan hutan di tingkat universitas pada masing-masing periode. Universitas-universitas di Amerika dan Jerman di periode 1900-1960-an menjadi referensi dan titik awal untuk mengirim pegawai dan ilmuwan kehutanan yang tersebar di berbagai dunia. Paradigma *scientific forestry* dimapankan oleh sebuah relasi struktural ranah universitas. Ilmuwan Indonesia banyak dikirim untuk mempelajari paradigma-paradigma yang berkembang di wilayah tersebut. Paradigma *scientific forestry* ini di Indonesia kemudian muncul. Delanty (2001) menjelaskan bahwa universitas sendiri muncul dalam hubungan konsepsi pengetahuan dengan struktur sosial dan budaya. Dimensi sosio-historis perkembangan teoritik ini juga tidak bisa dilepaskan dari dimensi relasi struktur politik dan ekonomi.

Keterhubungan gejala diskursus yang terjadi di tingkat universitas juga tidak bisa dilepaskan dari praktik dan keterlibatan universitas dalam praktik-praktik pembangunan pemerintahan. Delanty (2001) menjelaskan ini sebagai sebuah bingkai kerja institusional (*Institutional framework*). Konsep ini merujuk pada *mode of production* dan akumulasi kekayaan, peraturan populasi dan hubungan sosial dan pemerintah. Konsep ini memberi perhatian pada praktik-praktik sosial yang membentuk struktur-struktur ekonomi dan politik dari kelompok sosial sebagaimana institusi-institusi sosial di masyarakat. Pengelolaan hutan merupakan salah satu bingkai kerja dalam menata hubungan sosial pemerintah. Komunitas universitas menjadi penyedia kebijakan dan solusi teknis pembangunan, seperti yang dilakukan oleh IPB pada tahun 1975 bekerjasama dengan Departemen Pertanian mengadakan diskusi mengenai akselerasi degradasi tanah, yang berkesimpulan untuk tidak menyarankan petani yang berpindah-pindah lahan dan merekomendasikan kebijakan pertanian menetap, begitu juga UGM dan UNPAD yang turut aktif dalam membantu pemerintah mendesain *master plan* pertanian menetap, hal ini membuat praktek-praktek

subsistensi masyarakat hutan menjadi tidak relevan dengan proses modernisasi dan industrialisasi negara. Dari sini tampak bahwa diskursus alternatif yaitu *community-based forest management* tidak berkembang pada masa Orde Baru karena adanya relasi kuasa yang asimetris antara negara *vis a vis* masyarakat dan civil society.

Kesepahaman tentang Hutan Indonesia (KHI) yang dideklarasikan pada tahun 2000 merupakan salah satu peristiwa menarik yang menunjukkan hubungan dialektis antara perkembangan sosio-historis teori dan isu ilmiah kehutanan dan pergerakan struktur politik ekonomi yang melatar belakangi formasi diskursus yang berkembang dalam pengelolaan hutan. Kesepakatan tersebut dirumuskan dalam sebuah acara pertemuan alumni fakultas kehutanan yang mempertemukan berbagai *stake holder* pengelolaan kehutanan, dari ruang-ruang kelas universitas, gedung-gedung birokrasi, perusahaan trans nasional, hingga yang terjun langsung di bersama masyarakat sekitar hutan. Momen ini menarik karena menunjukkan bagaimana formasi diskursus yang terjadi pada institusi tersebut terbangun dari berbagai sektor pengelolaan kehutanan yang justru diikat oleh sebuah ikatan alumni universitas. Paradigma pengelolaan kehutanan pada momen ini merupakan salah satu implikasi dari irisan berbagai kepentingan yang dirancang dalam sebuah arena kekuasaan yang simetris, karena dibangun dari sebuah ikatan alumni. Meskipun tidak mempunyai implikasi secara legal terhadap kebijakan negara atau perusahaan swasta, akan tetapi hasil dari pertemuan ini cukup untuk menjustifikasi dan merubah berbagai kurikulum dan produksi pengetahuan yang terjadi pada tingkat universitas. Seperti disebutkan oleh Hendrayanto, Dekan Fakultas Kehutanan IPB bahwa perubahan kurikulum itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Keterhubungan antar aktor-aktor dalam produksi dan reproduksi diskursus muncul dalam keterhubungan berbagai konteks dari masing-masing aktor dalam proses perumusan kurikulum.

Penekanan pada aspek sistemik (ekosistem dalam pandangan informan) dalam paradigma pengelolaan hutan menurut Hendrayanto, Dekan Fakultas Pertanian IPB sebenarnya sudah disadari oleh kalangan ilmuwan kehutanan di Indonesia sejak dulu, akan tetapi tidak muncul dalam tataran praksis. Ia menceritakan bahwa pada masa ia mempelajari hal tersebut sebenarnya menunjukkan pada praktiknya produksi pengetahuan sebagai diskursus memang dipengaruhi oleh pemantapan dan relasi kuasa yang melatarbelakanginya. Salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Hendrayanto selaku dekan adalah :

Ditataran dialogis, saya bisa katakan (pergeseran paradigma) hampir memasuki semua segmen. Tetapi di dalam riil praktis kurikulum, hal tersebut tidak selalu tercermin. Nah kita dekati hal tersebut adalah melalui praktek kerja lapang. Dari situ paradigma itu dimasukkan. Tetapi untuk di (departemen) Manajemen Hutan itu, kita sebenarnya banyak memperkaya ke arah sana. Karena lebih domain ke hutan. Tapi seharusnya di konservasi dan ekowisata juga sama. Cuma saya belum libat secara khusus. Katakanlah ada mata kuliah yang mengarah kepada community based forest management. Tapi tingkat dialogis antara staf pengajar itu hampir sama. Artinya itu sudah masuk sebagai sebuah paradigma. Tapi belum secara penuh diekspresikan dalam bentuk kurikulum. Lalu di tingkat (departemen) Manajemen Hutan dengan adanya social forestry yang berbau ke arah sana itu semakin kaya dibandingkan kurikulum sebelumnya. Tapi saya sendiri menilai itu belum tuntas. Karena harapan awalnya semua perubahan paradigma, pergeseran obyektif pengelolaan ataupun approaching pengelolaan itu bisa masuk ke setiap mata kuliah. Harapannya seperti itu, tetapi kelibatannya debat itu soal pure academic dengan yang implemented. Disini terjadi saling tarik menarik.

Pada tingkat praksisnya perumusan kurikulum merupakan proses yang menggambarkan keterhubungan gejala-gejala sosial sebagai konteks produksi dan reproduksi

paradigma *Community Forestry* di IPB. Pada beberapa kasus selain dalam pertemuan alumni, peran LPPM sebagai sarana penelitian kehutanan di tingkat universitas juga menjadi salah satu institusi yang menjadi salah satu kanal pembentukan diskursus dan perubahan yang di implikasinya dalam tataran sosial politik produksi pengetahuan.

IV. KESIMPULAN

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan oleh negara merupakan realita dan struktur yang sangat memengaruhi struktur kognitif di universitas. Begitu juga sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang interaktif. Analisa kritis terhadap diskursus yang ada di dalam buku teks Pengantar Ilmu Kehutanan mengindikasikan bahwa diskursus *community-based* akan muncul dan mampu bertahan sebagai diskursus yang mapan menggantikan *scientific forestry*. Dalam tataran praktis, masih terdapat multi interpretasi terhadap paradigma *community-based* yang menyebabkan di dalam kurikulum, belum tercermin pada masing-masing departemen/jurusan, pergeseran paradig secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, Pierre dan Wacquant, Loic. (1992). *The Purpose of Reflexive Sociology (The Chicago Workshop)*, di dalam Bourdieu dan Wacquant, *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago : University of Chicago Press.
- Bourdieu, Pierre. (1989). *Social Space and Symbolic Power. Sociological Theory Vol7* : 14-25.
- Bourdieu, Pierre. (1991). *The Peculiar History of Scientific Reason, Sociological Forum, Vol6 Issue 1*.
- Delanty, Gerard. (2001). *Challenging Knowledge; The University in The Knowledge Society*, London : Open University Press.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta : LKiS.
- Fairclough, Norman. (2005). *Analysing Discourse, Textual analysis for social research*. London and New York : Routledge
- Fairclough, Norman. (2006). *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press
- Peluso, Nancy Lee. (1992). *Rich Forest, Poor People; Resource Control and Resistance in Java*. Barkeley : University of California Press.
- Ritzer, G dan Goodman, J. (2003). *Modern Sociological Theory, 6th Edition*. NY : McGraw-Hill.
- Sobur, Alex. (2001). *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung : Rosdakarya.
- Suhendang, Endang. (2002). *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Bogor : Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan.
- Warnick, Andrew. (2006). *Journal Theory. Culture and Society*, London : Sage Publication.
- Zaidi, SMH. et al. (1980). *The Role of The University in National Development; Tour Asian Case studies*. Malaysia : Vikas Pub.